RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Sampul No. 138 Telp. (061) 4519251 / 4538662 – Fax. (061) 4563708
Website : www.dinsos.sumutprov.go.id, e-mail : dinsos@sumutprov.go.id
M E D A N

BAB I
PENDAHULUAN

Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khusunya para PMKS melalui program pelayanan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, telah membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra pada setiap tahun anggaran melalui mekanisme berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Program kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, direalisasikan sesuai dengan prosedur penggunaan anggaran dan proses.

1.1. Latar Belakang.

Dengan semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan untuk bersaing dalam globalisasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi bahwa isu-isu permasalah kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada akhirnya akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahn sosial. Permasalahan politik berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan hukum berujung dengan permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung dengan permasalahan sosial, dan lain-lain. Tetapi, tidak pernah terjadi bahwa permasalahan ekonomi berakhir dengan permasalahan politik dan berhenti hanya di situ saja. Tetapi, dipastikan akan berakhir dengan permasalahan sosial.

Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain. Sudah barang tentu permasalahan sosial seperti ini sangat bervariasi

Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun *civil society* untuk

meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya (Suharto, 2005a). Maknanya, meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (**PMKS**), yakni mereka yang termasuk kelompok kurang beruntung (*disadvantaged groups*), seperti orang miskin, anak-anak dan wanita korban tindak kekerasan, anak jalanan, pekerja anak, orang dengan kemampuan berbeda (difabel), serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, asuransi sosial, jaring pengaman sosial, dan penguatan kapasitas kelompok marjinal adalah beberapa contoh program pembangunan kesejahteraan sosial.

Sustainable Development Goals (SDGs), yang resmi diberlakukan pada 1 Januari 2016. Terdapat 17 kesepakatan global dari *SDGs* tersebut, di mana posisi Kementerian Sosial mengambil fokus pada poin 1, 2, 10 dan 17 Adapun poin-poin tersebut adalah: "**Pertama, *no poverty***, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; **Kedua, *zero hunger***, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan; **Kesepuluh, *reduced inequalities***, mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia; serta **Ketujuhbelas, *partnership for the goals***, memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan SDGs di Indonesia ada di bawah koordinasi Bappenas yang juga menetapkan indikator-indikator dan pilar-pilar sebagai bagian dari penguatan pembangunan di wilayah perbatasan, pulau terluar, terdepan dan tepencil. Kita menyadari bahwa pencapaian sasaran SDGs ini adalah merupakan hal yang cukup berat dan harus ditangani secara bersama-sama baik antar lembaga atau departemen terkait bahkan antar negara baik regional maupun internasional. Bagaimana amanat SDGs ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan kongkrit oleh masing-masing negara atau kementerian/lembaga. Ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya Kementerian Dalam Negeri, atau Kementerian Sosial tetapi semua Kementerian atau lembaga yang ada termasuk masyarakat.

Di masa mendatang, permasalahan sosial ini akan semakin komplek dan besar dan selalu terkait dengan isu-isu yang lainnya. Karena itu, isu-isu tersebut sepertinya harus diantisipasi perkembangnnya sehingga permasalahan sosial tidak menyebar dan berkembang apa lagi membawa dampak yang lebih besar, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada disfungsi sosial.

Secara nasional isu-isu strategis yang muncul antara lain: (1) penajaman target sasaran berdasarkan pendekatan targetting (kegiatan, sasaran, lokasi), (2) sinergi dan keterpaduan program/kegiatan, sasaran dan lokasi antara yang ditetapkan Kemensos dengan Dinas Sosial

Provinsi dan Kabupaten/Kota, (3) keserasian penganggaran dana dekonsentrasi, dan tugas perbantuan, dana perimbangan, DAK, DAU, Dana Bagi Hasil, (4) penentuan indikator kinerja yang terukur, (5) kesepakatan pembiayaan bersama antara APBN dan APBD untuk komponen sub kegiatan di masing-masing kegiatan, (6) pembiayaan komponen sub kegiatan "publikasi" pada tiap kegiatan, dan (7) analisis anggaran berdasarkan indeks kemahalan pada beberapa provinsi.

Ada beberapa tantangan dan masalah yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah di masa mendatang, yaitu: (1) pelaksanaan otonomi daerah dan upaya pengembangan sistem implementasi UU No. 23 Tahun 2014; (2) menurunkan tingkat kemiskinan yang jumlahnya semakin besar dan penanganan isu-isu strategik dan global, seperti: ketenagakerjaan, integrasi sosial, lingkungan hidup, HAM, demokratisasi, kesetaraan jender, kemitraan global, dan sebagainya; (3) perlunya kajian baru untuk melihat arah, orientasi dan bentuk program pembangunan kesejahteraan sosial; (4) peningkatan peran serta masyarakat dalam semua kegiatan. Dari isu global dan nasional seperti yang telah disebutkan di atas, maka isu-isu strategis pembangunan kesejahteraan sosial yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

1. **Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi:**
   a. Masalah sosial keluarga miskin.
   b. Masalah sosial pengembangan potensi Karang Taruna, PSM, Orsos
   c. Masalah sosial keluarga yang mengalami hambatan sosial psikologis.
   d. Masalah sosial keluarga rawan ekonomi, seperti: janda, PHK, dll.
   e. Masalah sosial pengembangan dan penanaman nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.
   f. Masalah sosial peningkatan peranan dan fungsi lembaga perlindungan anak.
   g. Masalah sosial peningkatan peranan dan fungsi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
   h. Peningkatan sumbangan sosial.

2. **Permasalahan Rehabilitasi Sosial, meliputi:**
   a. Masalah sosial penyandang cacat.
   b. Masalah sosial korban tindak kekerasan.
   c. Masalah sosial penyalagunaan narkotika.
   d. Masalah sosial kenakalan remaja (seperti: tawuran, perkelahian sesama remaja, perlawanan terhadap guru, perampokan, pembajakan, dan lain-lain).
   e. Masalah sosial tuna sosial.
   f. Masalah sosial HIV / AIDS (Acuaired Immuno Deficiency Syndrome).
   g. Masalah sosial peningkatan fungsi dan peranan Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
   h. Masalah sosial kesejahteraan sosial lanjut usia.
   i. Masalah kesejahteraan sosial anak anak terlantar.

3. **Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang meliputi:**
   a. Masalah sosial kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.
   b. Masalah sosial penanggulangan korban bencana.
   c. Pemberian asuransi kesejahtraan sosial.
   d. Masalah sosial integrasi antara etnis (kerusuhan).

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan Daerah secara konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi, maka Perencanaan Pembangunan Daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai wujud dokumen dari Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (1 Tahun) maka OPD berkewajiban menyusun Renja OPD yang akan menjadi bahan bagi Perumusan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam penyusunannya, Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 berpedoman kepada dokumen perencanaan lainnya yakni Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Sumatera Utara yang merupakan turunan dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Disamping berpedoman kepada dokumen perencanaan yang telah ada, maka penyusunan Renja dimaksud memperhatikan juga hal-hal seperti Sumber Daya dan Potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isue-isue strategis khususnya masalah kemiskinan.

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, menjadi sesuatu yang urgen informasi dan masukan dari para pelaksana Program Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota termasuk ORSOS pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditengah-tengah masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin.
5. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK66/2005 tentang pedoman pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang PMKS dan PSKS.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 4 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 201-2019.
10. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembar daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32).
11. Pergubsu No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6).
12. Pergubsu No. 10 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Renja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran rangkaian Program Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2021.

Tujuan :

1. Terwujudnya kegiatan tahunan penyelenggaraaan kesejahteraan sosial sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan kesejahteraan sosial.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provsu Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Provsu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provsu

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provsu

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provsu.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting

4.2. Kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVSU TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelakasanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Provsu.

Pada awal penetapan APBD 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengalokasikan anggaran untuk program kegiatan pembangunan Kesejahteraan Sosial ***Rp. 45.943.539.600,- (Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)*** termasuk dengan anggaran yang di alokasikan untuk program kegiatan penunjang seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan lain-lain.

Pada P-APBD Tahun 2019 dengan adanya kebijakan Rasionalisasi Anggaran, maka anggaran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berkurang ***Rp.7.894.619.580,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah***), sehingga total menjadi ***Rp. 38.048.920.020,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Puluh Rupiah)*** termasuk dengan anggaran yang di alokasikan untuk program kegiatan penunjang seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan lain-lain.

Realisasi penggunaan anggaran tersebut s/d akhir Tahun Anggaran 2019 adalah ***92,52% atau Rp. 35.201.264.944,- (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)***.

Bila realisasi penggunaan anggaran dimaskud difokuskan pada target pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), maka realisasi fisik mencapai 95,00 % dimana jumlah PMKS yang menerima pelayanan adalah 2.595 Orang dan 140 KK yang terdiri dari :

- KAT dan Keluarga Miskin : 140 KK
- PMKS Luar Panti (Anak dan Disabilitas) : 250 Orang
- PMKS dalam Panti Pemerintah (Anak Terlantar, Disabilitas, Lansia, Gepeng, WTS) : 2.345 Orang

Adapun jumlah PSKS yang diberdayakan atau dimantapkan adalah 465 Orang yang terdiri dari :

- PSM : 0 Orang
- Tagana : 65 Orang
- TKSK : 0 Orang
- Karang Taruna : 100 Orang
- Tenaga Kesejahteraan Sosial : 300 Orang

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa realisasi program kegiatan penanganan PMKS tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Adapun faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah Volume kegiatan yang relatif kecil dibanding dengan ketersediaan tenaga pelaksana kegiatan. Lampiran Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provsu.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sampai dengan penyusunan Renja OPD Tahun 2021 masih menggunakan tolak ukur indikator kinerja berdasarkan pencapaian target satuan pelayanan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama 1 tahun anggaran terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik di dalam panti sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun PMKS diluar panti serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2);, Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), bahwa Jenis SPM Sosial Provinsi yang menjadi target sasaran pelayanan adalah:

- **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti.**
- **Rehabilittasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti.**
- **Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti.**
- **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti.**
- **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.**

PMKS Luar panti yang menjadi target sasaran pelayanan adalah:

- Keluarga Miskin.
- Penyandang disabilitas.
- Anak Terlantar.
- Lansia Terlantar.
- Gelandangan dan Pengemis.
- Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
- Korban Tindak Kekerasan/ Pekerja Migran

Sedangkan PSKS yang menjadi target sasaran Pemberdayaan adalah 3.912 orang dengan rincian sebagai berikut:

Karang Taruna	826	Orang
LKS/Orsos	248	Lembaga
PSM	1.657	orang
Tagana	831	Orang
TKSK	444	Orang
WKSBM	71	Lembaga

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Lampiran Tabel 2.2.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Kinerja, Pelayanan

Dibandingkan dengan besaran PMKS di Sumatera Utara sesuai dengan data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka jumlah PMKS yang dapat menerima pelayanan sosial relatif sangat kecil. Pada tahun 2019 PMKS yang menerima pelayanan dari sumber dana APBD Provinsi hanya sebanyak 2.595 Orang dan 140 KK. Bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang 991.244 orang tersebar di 33 Kab/Kota.

Koordinasi dan sinergi program baik dengan Kementerian Sosial RI maupun Pemerintah Kab/ Kota sudah terjalin dengan baik khususnya melalui forum Musrembang Provinsi dan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Dinas Sosial Kab/ Kota. Sedangkan dengan Kementerian Sosial RI dilakukan dalam forum Musrembang (RKP, Renja, RKA) dan evaluasi pelaksanaan program.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara lain:

- Minimnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Pekerja Sosial di Dinas/ Instansi Sosial Kab/Kota.
- Dukungan anggaran bagi penyelenggaran kesejahteraan sosial baik dalam APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota belum memadai dibanding dengan jumlah PMKS yang ada.
- Ketersediaan data PMKS sebagai landasan awal dalam penyusunan program kegiatan, akurasinya masih membutuhkan perbaikan. Pemerintah Kab/Kota sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pendataan PMKS terlaksana secara memadai.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Pelayanan sosial yang diberikan kepada para PMKS melalui program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial akan berpengaruh positif terhadap pencapaian prinsip dasar visi misi Kepala Daerah. Demikian juga terhadap upaya pencapaian tujuan SDGS point penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2019.

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Kondisi yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesejahteraan sosial adalah penduduk yang mengalami kerentanan sebagai akibat dari permasalahan fisik/disabilitas, ketidakberdayaan karena usia, gender dan sosial, ketidakadaan kesempatan untuk melakukan investasi diri, kejadian bencana dan konflik sosial, diskriminasi, eksploitasi serta guncangan ekonomi akibat bencana. Kelompok penduduk ini meliputi penyandang disabilitas, anak, perempuan, usia

lanjut dan korban bencana, serta penduduk miskin dan rentan produktif yang terkendala kerentanan tertentu. Terbatasnya sebaran sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk sistem layanan dan rujukan terpadu, regulasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang masih terbatas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum inklusif, lemahnya sinkronisasi pusat dan daerah, serta terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan minimal bidang sosial (SPM) menjadi tantangan yang perlu disikapi oleh Dinas Sosial Provsu.

Pada tataran antara Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota, permasalahan integrasi, lokus dan fokus, segmentasi program/kegiatan, target layanan, pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan, sinergitas dan sinkronisasi, standar pelayanan dan pengawasan, kualitas dan kuantitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kelembagaan dan mekanisme sistem pelayanan yang berorientasi pada *output*, serta tidak tersedianya basis data dan sistem layanan yang terintegrasi, masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dampak dari hal tersebut adalah sulitnya memperoleh data capaian kinerja *outcome* dan *impact* program Dinas Sosial yang telah dilaksanakan. Dinas Sosial tidak dapat mengukur berapa besar kontribusi yang diberikan pada program daerah percepatan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan sosial dasar bagi penduduk miskin dan rentan. Beberapa permasalahan lain yang muncul dari hasil pertemuan dengan Kementerian Sosail dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota serta penduduk, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Sosial masih kurang didukung komitmen daerah, serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah, hal ini disebabkan kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Dinas Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah.

2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak terstandar, dan kurang didukung oleh SDM kesejahteraan sosial yang memadai menjadikan pelayanan sosial di daerah sulit memberikan perubahan yang signifikan dalam pemecahan masalah.
3. Tidak tersedianya data base line dan populasi serta terget yang tidak didukung dengan kriteria program/kegiatan serta indeks bantuan sosial yang belum memadai dan belum standar berdampak terhadap sulitnya menentukan batas lama waktu penerimaan bantuan bagi penerima manfaat. Tingkat akurasi yang rendah menjadikan program/kegiatan berpotensi tidak tepat serta melemahkan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial.
4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar mengakibatkan kurang bermanfaat bagi penerima bantuan, baik bantuan sosial temporer maupun bantuan sosial reguler.
5. Lembaga kesejahteraan sosial yang tidak didukung oleh kualitas SDM melalui sertifikasi, pengawasan yang belum memadai dan belum optimalnya sistem akreditasi serta tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) berdampak terhadap tingkat pemahaman dan sistem layanan yang diberikan bagi penerima manfaat.
6. Kurang optimalnya peran penyuluh sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial yang terbaik bagi penerima manfaat menjadikan pelayanan kelembagaan merupakan solusi bagi penerima manfaat untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
7. Pemahaman masyarakat akan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dipandang sebagai pemberian seperti anggapan bahwa Dinas Sosial berfungsi karikatif (hanya memberi bantuan pada penyandang Disabilitas dan fakir miskin atau korban bencana sebagai derma/sumbangan). Bukan melihatnya sebagai bagian integral dari pembangunan Sumatera Utara secara umum dan menyeluruh.
8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat menimbulkan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum diimbangi oleh sumber daya manusia yang professional.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di provinsi sumatera utara yang penuh tantangan masih mendapatkan peluang sampai saat ini dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain:

- Kementerian Sosial RI masih tetap komit untuk mengalokasikan anggaran Dekon bagi pelayanan sosial terhadap PMKS yang ada di Sumatera Utara.
- Organisasi Sosial (Orsos) yang memberikan pelayanan terhadap PMKS khususnya anak terlantar di Sumatera Utara senantiasa terus bertumbuh, terhadap orsos – orsos ini perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

i. Formulasi Isu – Isu Penting

- Program kegiatan untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran melalui bimbingan sosial yang dilaksanakan dalam kegiatan Penanganan fakir miskin diharapkan bermuara pada terbangunnya modal sosial guna mewujudkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan bagian penting dari langkah menuju terbangunnya kesadaran kolektif dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan dalam suasana tertib sosial.
- Meningkatkan peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti Karang Taruna, PSM, LKS dan lain-lain sebagai pendamping dalam pelaksanaan program kegiatan sekaligus memperkuat kohesi, harmoni, kesetiakawanan sosial yang berbasis "Kemanusiaan yang adil dan beradab".
- Desa pelopor pembangunan kesejahteraan sosial sebagai sentra pelayanan sosial bagi para PMKS untuk terwujudnya ketahanan sosial masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya kondisi kemasyarakatan yang kurang menguntungkan kehidupan warga masyarakat secara keseluruhan.

b. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

Didalam rancangan awal RKPD Tahun 2021 secara tepat dibunyikan program kegiatan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang bersentuhan langsung dengan penanganan kemiskinan.

Untuk mendukung pencapaian prinsip dasar visi dan misi Kepala Daerah dan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksankan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1), diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2); **Permendagri 86 Tahun 2017, SPM** menjadi salah satu **acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alookasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah,** Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat 1), Serta Program dan Kegiatan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Nasional.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, Lampiran Tabel 2.3.

c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

- Dinas/ Instansi Sosial Kab/ Kota;
- Orsos yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial; dan
- Perusahaan – perusahaan yang menggunakan dana CSR bagi usaha kesejahteraan sosial.

Pada awal Maret 2020, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengadakan "*E-Musrembang Provinsi Sumsatera Utara* " pada 4 Zona yaitu Dataran Tinggi, Dataran Rendah, Pantai Barat dan Pantai Timur dengan Dinas Sosial dan BAPPEDA Kab/ Kota se-Sumatera Utara. Melalui kegiatan dimaksud, dihimpun informasi tentang usulan Kab/ Kota terhadap program/ kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayan masing – masing.

Usulan yang diajukan pada umumnya adalah program kegiatan yang sudah baku didalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah dikompilasi pada Tabel 2.4 tersebut.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah : ***Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan dan Jaminan Sosial***, dalam penanganan terhadap permasalahan sebagai berikut :

- Penanggulangan Kemiskinan;
- Penanggulangan Bencana Alam;
- Penanganan Keterlantaran;
- Penanganan Kecacatan;
- Penanganan Keterpencilan;
- Penanganan Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Prilaku; dan
- Penanganan Korban Tindak Kekerasan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Meingkatkan martabat, harga diri dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan manajemen pelayanan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
- Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penerima pelayanan sosial;
- Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam mencegah, mengendalikan, dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- Meningkatnya kesadaran dan wawasan kesejahteraan sosial dalam perumusan kebijakan publik;
- Melembaganya sistem kesejahteraan sosial secara nasional.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Prinsip dasar yang terkandung dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu **Visi *"Sumatera Utara Maju, Aman dan Bermartabat"*, *Misi* "*Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara dalam Kehidupan Karena Memiliki***

Iman dan Taqwa, Tersedianya Sandang Pangan Yang Cukup, Rumah Yang Layak, Pendidikan Yang Baik, Kesehatan Yang Prima, Mata Pencaharian Yang Menyenangkan Serta Harga-Harga Yang Terjangkau" Apa bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, maka program – program kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan baik dengan sumber dana APBD maupun dana APBN minimal akan berkontribusi dalam pencapaian *"Menurunnya Angka Kemiskinan di Sumatera Utara"*.

Berkaitan dengan pencapaian Visi Misi Gubernur Sumatera Utara dan SDGs pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point **Pertama,** ***no poverty***, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; **Kedua,** ***zero hunger***, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1), *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah 1) Kesehatan, 2)Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, 4) Pendidikan. 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.* ***6) Sosial.***

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2); serta Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi (Pasal 7 ayat), bahwa **Jenis SPM Sosial Provinsi :**

a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Target sasaran pelayanan PMKS dalam panti Tahun Anggaran 2021 pada UPT lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara berjumlah **2.045 Orang.** Pelayanan yang harus dipenuhi di dalam panti adalah sebagai berikut

a. Pengasuhan
b. Permakanan

c. Sandang
d. Asrama yang mudah diakses
e. Perbekalan kesehatan
f. Bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
g. Bimbingan ketrampilan hidup sehari-hari
h. Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak
i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
j. Pelayanan penelusuran keluarga
k. Pelayanan reunifikasi keluarga
l. Akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti

Sarana dan Prasarana yang wajib ada di dalam panti adalah sebagai berikut :

a. Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur.
b. Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktek ketrampilan, dan ruang kesenian.
c. Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus
d. Tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan
e. Peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang peralatan teknis.
f. Alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan
g. Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan

Program dan Kegiatan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Nasional :

a. **Program Penanganan Fakir Miskin.**
   - Melatih dan memberi bantuan peralatan nelayan (2 KUBE Pesisir/Nelayan)
   - Melatih dan memberi bantuan ternak (KUBE Perkotaan dan KUBE Pedesaan).
   - Mendukung pelaksanakan program "MAMIPRO (Masyarakat Miskin Produktif)" dengan tujuan menciptakan wirausaha dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin.

b. Program Pemberdayaan Sosial.
   - .Memberdayakan TKSK
   - Bantuan Paket Keterampilan kepada kelompok KUBE (Pelatihan dan bantuan).
   - Membina PSM
   - Melatih dan membina karang taruna.
   - Memeilihara makam pahlawan
   - Menyelenggarakan HKSN Provinsi.

c. Program Rehabilitasi Sosial
   - Memberi bantuan kepada Lansia Terlantar
   - Memberi bantuan modal usaha kepada Disabilitas
   - Pengadaan alat bantu (Kursi roda, Kursi Roda lipat, alat bantu dengar)
   - Melakukan pemulangan orang terlantar

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   - Melatih dan memantapkan petugas penanggulangan bencana
   - Pengadaan permakanan bagi korban bencana.
   - Bimbingan pemantapan dan bantuan kepda pendamping/operator PKH

3.3.2. Program kegiatan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan langsung dengan hal-hal tersebut diatas selengkapnya adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan
I.	**Program Pemberdayaan Sosial**
1	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan
2	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Pedesaan
3	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin di Perkotaan
4	Rehabilitasi Sarana Lingkungan
5	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program
II	**Program Rehabilitasi Sosial**
1	Pembinaan Anak Jalanan
2	Pembinaan UEP bagi orang tua Anak Terlantar
3	Penyelenggaraan Hari Anak (One Day For Children)

4	Pembinaan Lanjut Usia Potensial
5	Penyelenggaraan Hari Lansia
6	Pelatihan dan Pemantapan UEP Penyandang Disabilitas
7	Pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas.
8	Pembinaan Lembaga Disabilitas
9	Penyelenggaraan Hari Jadi Disabilitas dan Bantuan Modal Usaha
10	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi WTS
11	Pembinaan dan Pelatihan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang
12	Pembinaan dan Pemberian UEP bagi Eks NAPZA
13	Pelaksanaan Razia Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas
14	Pembinaan dan penanganan panti Asuhan, Lansia, Disabilitas dan Tuna Sosial.
15	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pemulung
16	Pembinaan dan Pelatihan Bagi ODHA
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**
1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi
2	Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3	Pembinaan dan Pembentukan KUBE di Lokasi Binaan PKK Terpadu
4	Pembinaan dan Penumbuhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
5	Pembinaan dan Kerjasama TKSK
6	Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna
7	Karang Taruna EXPO
8	Bulan Bakti Karang Taruna
9	Penerbitan Majalah Getar
10	Sosialisasi dan pembinaan tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang terhadap Pengusaha, Orsos dan Masyarakat.
11	Pembinaan dan Penyuluhan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
12	Pembinaan dan Penyantunan Keluarga Veteran Tidak Mampu
13	Pembinaan BK3S Provsu
14	Penyelenggaraan HKSN
15	Koordinasi dan Dukungan layanan bagi PSKS Se Provinsi
16	Penyuluhan Sosial Keliling
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**
1	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana
2	Apel Siaga Taruna Siaga Bencana
3	Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana
4	Distribusi Permakanan (Lauk Pauk, Evakuasi Korban Bencana)
5	Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana
6	Pemetaan Daerah Rawan Bencana
7	Pembinaan Keserasian Sosial Daerah
8	Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial
9	Pendataan dan Seleksi Korban Bencana Sosial di daerah
10	Distribusi Permakanan dan bahan Bangunan Rumah bagi Korban Bencana Sosial
11	Pembinaan Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
12	Bimbingan Pemantapan bagi Pendamping dan Operator PKH
13	Bimbingan Teknis SDM PKH berkemampuan IPTEK

Untuk lebih menjamin Pencapaian tepat sasaran yang lebih konkrit maka penyebaran lokasi kegiatan lebih mengedepankan ketersediaan data *"By Name By Adress"* dari Kabupaten/Kota.

3.3.3 Rumusan Program dan Kegiatan dengan rancangan awal RKPD didalam Rumusan sementara Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Utara, maka target Indikator Utama RPJMD Bidang Kesejahteraan Sosial belum ada tercantum Penganggaran Kegiatan yang menjadi Fokus tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

3.3.4 Tabel Rencana Program dan Kegiatan secara lengkap terlampir
(Tabel 3.1)

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting

1. Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Provsu T.A. 2021 mengajukan sebesar ***Rp.82.914.171.753,- (Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)***, juga yang di sediakan pada e-planning tahun 2021.
2. Anggaran yang di sediakan pada PPAS sekitar ***Rp. 67.122.072.305,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)***, angggaran tersebut tidak memadai dalam melaksanakan target SPM Bidang Sosial Sesuai PP No.2 Tahun 2018 Tentang SPM, mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan SPM.
3. Program Rutin Serta target Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang merupakan program yang mendukung Prioritas Nasional TA. 2021. tidak akan terpenuhi, karena minimnya anggaran.
4. Jumlah keluarga miskin yang menjadi target sasaran Program kegiatan terlalu kecil dibandingkan dengan target jumlah keluarga miskin di Provinsi Sumatera Utara.
5. Besar kecilnya alokasi anggaran APBD menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian Kementerian Sosial RI dalam mengalokasi Dana Dekonsentrasi APBN ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Program kegiatan pembagunan Kesejahteraan Sosial berorientasi kepada Pelayanan Sosial bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan strategi :

- Pemberdayaan Sosial
- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan Sosial
- Jaminan Sosial

Strategi tersebut dalam praktek pelaksanaanya didasarkan kepada Proses Intervensi ilmu Pekerjaan Sosial

Demikian rencana kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara kami usulkan sebagai bahan masukan pada pengusulan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021.

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA UTARA,

dto

H. RAJALI, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670208 198611 1 001

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama OPD : Dinas Sosial PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	SUMUT	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**		**34.148.057.348**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	SUMUT	**Cakupan Layanan Administrasi yang tertangani**		**33.948.457.348**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	SUMUT	Terlaksananya administrasi surat menyurat pada Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	24.655.000	Penyediaan jasa surat menyurat	SUMUT	Terlaksananya administrasi surat menyurat pada Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	24.655.000	
	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	SUMUT	Lancarnya kinerja PNS Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	1.750.151.992	Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	SUMUT	Lancarnya kinerja PNS Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	1.750.151.992	
	Penyediaan jasa administrasi Perkantoran / keuangan	SUMUT	Terbantunya kelancaran tugas administrasi perkantoran dan keuangan Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	2.082.680.000	Penyediaan jasa administrasi Perkantoran / keuangan	SUMUT	Terbantunya kelancaran tugas administrasi perkantoran dan keuangan Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	2.082.680.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SUMUT	Terpeliharanya kebersihan kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	2.621.044.316	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SUMUT	Terpeliharanya kebersihan kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	2.621.044.316	
	Penyediaan alat tulis kantor	SUMUT	lancarnya tugas-tugas PNS dilingkungan Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	257.746.500	Penyediaan alat tulis kantor	SUMUT	lancarnya tugas-tugas PNS dilingkungan Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	257.746.500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SUMUT	lancarnya kinerja PNS dalam rangka administrasi kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	197.774.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SUMUT	lancarnya kinerja PNS dalam rangka administrasi kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	197.774.800	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SUMUT	lancarnya kinerja PNS dalam rangka administrasi kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	169.611.540	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SUMUT	lancarnya kinerja PNS dalam rangka administrasi kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	169.611.540	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SUMUT	meningkatnya wawasan aparatur Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	27.909.500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SUMUT	meningkatnya wawasan aparatur Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	27.909.500	
	Penyediaan makanan dan minuman	SUMUT	Jumlah PM/WBS di 17 UPT Dinsos Provsu yang terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari.	2.375	21.976.467.000	Penyediaan makanan dan minuman	SUMUT	Jumlah PM/WBS di 17 UPT Dinsos Provsu yang terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari.	2.375	21.976.467.000	
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SUMUT	Terpeliharanya keamanan kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	1.950.125.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		Terpeliharanya keamanan kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	12	1.950.125.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SUMUT	lancarnya tugas-tugas aparatur pada Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	1.221.046.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	SUMUT	lancarnya tugas-tugas aparatur pada Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	1.221.046.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SUMUT	Lancarnya tugas-tugas aparatur Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	1.083.317.600	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SUMUT	Lancarnya tugas-tugas aparatur Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	1.083.317.600	
	Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	SUMUT	Terlaksanya Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	1	234.216.300	Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	SUMUT	Terlaksanya Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	1	234.216.300	
	Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	SUMUT	Tersosialisasinya Peraturan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	0	0	Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	SUMUT	Tersosialisasinya Peraturan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	3	-	
	Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	3	14.450.000	Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	3	14.450.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	0	-	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1	-	
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	2	337.261.800	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	2	337.261.800	
	Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	SUMUT	Terlaksanya Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	0	-	Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	SUMUT	Terlaksanya Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	2	-	
	Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	0	-	Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	1	-	
	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SUMUT	terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pengendallan Intern Pemerintah (SPIP)	1	36.000.000	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SUMUT	terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	36.000.000	
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provsu	SUMUT	terlaksananya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provsu	1	118.180.000	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provsu	SUMUT	terlaksananya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Sosial Provsu	1	118.180.000	
	Penyelenggaraan Hari-hari besar lainnya	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-hari besar lainnya	1	45.420.000	Penyelenggaraan Hari-hari besar lainnya	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-hari besar lainnya	1	45.420.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**SUMUT**	**Rasio Luas Kantor/Jumlah aparatur**		**28.526.004.815**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**SUMUT**	**Rasio Luas Kantor/Jumlah aparatur**		**28.526.004.815**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SUMUT	Lancarnya kinerja PNS pada Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	3.491.449.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SUMUT	Lancarnya kinerja PNS pada Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	3.491.449.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SUMUT	Terpeliharanya Gedung Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	24.296.643.465	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SUMUT	Terpeliharanya Gedung Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	24.296.643.465	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SUMUT	Terpeliharanya kenderaan dinas/ operasional	12	538.098.750	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SUMUT	Terpeliharanya kenderaan dinas/ operasional	12	538.098.750	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SUMUT	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	199.813.600	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SUMUT	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Dinsos Provsu dan 17 UPT Dinsos Provsu.	1	199.813.600	
		SUMUT					SUMUT				
	Program Peningkatan Disiplin Sumberdaya Aparatur	**SUMUT**	**Persentase Disiplin Sumber daya Aparatur yang Meningkat**		-	**Program Peningkatan Disiplin Sumberdaya Aparatur**	**SUMUT**	**Persentase Disiplin Sumber daya Aparatur yang Meningkat**		-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	SUMUT	Meningkatnya disiplin PNS dan Non PNS pada Dinas Sosial Provsu	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	SUMUT	Meningkatnya disiplin PNS dan Non PNS pada Dinas Sosial Provsu	-	-	
		SUMUT					SUMUT				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**SUMUT**	**Persentase Dokumen/Laporan Yang Mampu Disusun Secara Mandiri Tepat Waktu**		24.000.000	**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**SUMUT**	**Persentase Dokumen/Laporan Yang Mampu Disusun Secara Mandiri Tepat Waktu**		24.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SUMUT	Jumlah SDM aparatur Dinas Sosial Provsu yang Meningkat kualitasnya	1	24.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SUMUT	Jumlah SDM aparatur Dinas Sosial Provsu yang Meningkat kualitasnya	1	24.000.000	
	Pelaksanaan tim penilai angka kredit jabatan fungsional pekerja sosial	SUMUT	Jumlah jabatan fungsional peksos yang Terlaksana penilaian dan penghitungan angka kreditnya	0	-	Pelaksanaan tim penilai angka kredit jabatan fungsional pekerja sosial	SUMUT	Jumlah jabatan fungsional peksos yang Terlaksana penilaian dan penghitungan angka kreditnya	-	-	
	Pelaksanaan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	SUMUT	Jumlah jabatan fungsional penyuluh sosial yang terlaksana penilaian dan penghitungan angka kreditnya	0	-	Pelaksanaan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial	SUMUT	Jumlah jabatan fungsional penyuluh sosial yang terlaksana penilaian dan penghitungan angka kreditnya	-	-	
		SUMUT					SUMUT				
	Program Penanganan Fakir Miskin	**SUMUT**	**Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh ketrampilan dan bantuan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera**	**1.061**	**3.399.638.500**	**Program Penanganan Fakir Miskin**	**SUMUT**	**Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh ketrampilan dan bantuan usaha dalam mencapai keluarga sejahtera**	**1.061**	**3.399.638.500**	
	Penanganan Fakir Miskin di Pedesaan	SUMUT	Jumlah Keluarga Miskin di Pedesaan yang dibantu	400	1.133.150.500	Penanganan Fakir Miskin di Pedesaan	SUMUT	Jumlah Keluarga Miskin di Pedesaan yang dibantu	400	1.133.150.500	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Fakir Miskin Miskin di Perkotaan	SUMUT	Jumlah Keluarga Miskin di Perkotaan yang dibantu	180	417.126.000	Penanganan Fakir Miskin Miskin di Perkotaan	SUMUT	Jumlah Keluarga Miskin di Perkotaan yang dibantu	180	417.126.000	
	Penanganan Fakir Miskin Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan	SUMUT	Jumlah Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan yang dibantu.	480	1.306.223.500	Penanganan Fakir Miskin Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan	SUMUT	Jumlah Keluarga Miskin di Daerah Pesisir/ Nelayan yang dibantu.	480	1.306.223.500	
	Rehabilitasi Sarana Lingkungan.		Jumlah lokasi sarana lingkungan yang di rehabilitasi.	0	0	Rehabilitasi Sarana Lingkungan.		Jumlah lokasi sarana lingkungan yang di rehabilitasi.	0	0	
	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program	SUMUT	Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program	1	543.138.500	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program	SUMUT	Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program	1	543.138.500	
	Program Rehabilitasi Sosial	SUMUT	**Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat melangsungkan dan mengembangkan hidupnya sesuai dengan fungsi sosialnya**	**2.414**	**6.339.617.260**	**Program Rehabilitasi Sosial**	SUMUT	**Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dapat melangsungkan dan mengembangkan hidupnya sesuai dengan fungsi sosialnya**	**2.414**	**6.339.617.260**	
	Rehabilitasi Sosial Anak /Pembinaan Anak Terlantar	SUMUT	Jumlah anak terlantar yang diterminasi, Terlaksananya Sosialisasi Anak Terlantar/Jalanan, Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Anak (One Day For Children), Terlaksananya Rakor Panti Sosial Anak pemerintah dan Swasta Dan Terlaksananya Penjangkauan dan monitoring ke Kab/Kota	0	0	Rehabilitasi Sosial Anak /Pembinaan Anak Terlantar	SUMUT	Jumlah anak terlantar yang diterminasi, Terlaksananya Sosialisasi Anak Terlantar/Jalanan, Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Anak (One Day For Children), Terlaksananya Rakor Panti Sosial Anak pemerintah dan Swasta Dan Terlaksananya Penjangkauan dan monitoring ke Kab/Kota	0	0	
	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia (Lansia)	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Lansia	1	149.024.500	Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia (Lansia)	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Lansia	1	149.024.500	
	Pembinaan Lanjut Usia Potensial tidak mampu	SUMUT	Jumlah Lanjut Usia Potensial tidak mampu yang mendapatkan Pembinaan, Terlaksananya Penjangkauan dan monitoring ke Kab/Kota, dan Terlaksananya Rakor Panti Sosial Lansia Swasta	0	0	Pembinaan Lanjut Usia Potensial tidak mampu	SUMUT	Jumlah Lanjut Usia Potensial tidak mampu yang mendapatkan Pembinaan, Terlaksananya Penjangkauan dan monitoring ke Kab/Kota, dan Terlaksananya Rakor Panti Sosial Lansia Swasta	0	0	
	Pelatihan dan Pemantapan UEP Penyandang Disabilitas	SUMUT	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelatihan dan Pemantapan UEP, dan Terlaksananya Sosialisasi penyadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas	0	0	Pelatihan dan Pemantapan UEP Penyandang Disabilitas	SUMUT	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelatihan dan Pemantapan UEP, dan Terlaksananya Sosialisasi penyadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas	0	0	
	Pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas dan Lansia	SUMUT	Jumlah penyandang Disabilitas dan lansia tidak potensial yang mendapatkan alat bantu serta bantuan terminasi, Jumlah Lembaga Disabilitas yang memperoleh pembinaan, Penyelenggaraan Hari Jadi Disabilitas dan Bantuan Modal Usaha	0	0	Pengadaan alat bantu penyandang Disabilitas dan Lansia	SUMUT	Jumlah penyandang Disabilitas dan lansia tidak potensial yang mendapatkan alat bantu serta bantuan terminasi, Jumlah Lembaga Disabilitas yang memperoleh pembinaan, Penyelenggaraan Hari Jadi Disabilitas dan Bantuan Modal Usaha	0	0	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Tuna Sosial.	SUMUT	Jumlah WTS yang mendapatkan Pembinaan dan rehabilitasi, Penjangkauan Tuna Sosial yang akan masuk ke dalam panti, Jumlah KTK dan KPO yang menerima Pembinaan dan Pelatihan, Jumlah Eks NAPZA yang mendapatkan Pembinaan, Jumlah penyandang ODHA yang menerima Pembinaan dan Pelatihan, dan Terlaksananya Rakor antar UPT ,LSK Tuna Sosial dan pihak yang terkait.	0	0	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Tuna Sosial.	SUMUT	Jumlah WTS yang mendapatkan Pembinaan dan rehabilitasi, Penjangkauan Tuna Sosial yang akan masuk ke dalam panti, Jumlah KTK dan KPO yang menerima Pembinaan dan Pelatihan, Jumlah Eks NAPZA yang mendapatkan Pembinaan, Jumlah penyandang ODHA yang menerima Pembinaan dan Pelatihan, dan Terlaksananya Rakor antar UPT ,LSK Tuna Sosial dan pihak yang terkait.	0	0	
	Pelaksanaan Razia Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas	SUMUT	Jumlah Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas yang terjaring Razia	3	49.500.000	Pelaksanaan Razia Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas	SUMUT	Jumlah Tuna Sosial, Anjal dan Disabilitas yang terjaring Razia	3	49.500.000	
	Pembinaan dan penanganan panti Asuhan, Lansia, Disabilitas dan Tuna Sosial.	SUMUT	Terlaksananya pembinaan dan penanganan PM pada 17 UPT Dinsos Provsu	2.375	5.972.083.760	Pembinaan dan penanganan panti Asuhan, Lansia, Disabilitas dan Tuna Sosial.	SUMUT	Terlaksananya pembinaan dan penanganan PM pada 17 UPT Dinsos Provsu	2.375	5.972.083.760	
	Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	SUMUT	Jumlah Orang Terlantar dan PMKS Lainnya yang menerima pemulangan.	35	169.009.000	Penanganan dan Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	SUMUT	Jumlah Orang Terlantar dan PMKS Lainnya yang menerima pemulangan.	35	169.009.000	
	Penjangkauan Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODGJ)	SUMUT	Terjangkaunya Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODGJ)	0	0	Penjangkauan Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODGJ)	SUMUT	Terjangkaunya Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODGJ)	0	0	
	Program Pemberdayaan Sosial	**SUMUT**	**Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didayagunakan sesuai dengan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial**	**145**	**9.660.044.580**	**Program Pemberdayaan Sosial**	**SUMUT**	**Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didayagunakan sesuai dengan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial**	**145**	**9.660.044.580**	
	Pemberdayaan Sosial Perorangan dan keluarga.	SUMUT	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang menerima pemberdayaan dan pelatihan keterampilan, Jumlah Peksos LK3, yang menerima pemberdayaan, dan Terlaksananya Bintek SLRT bagi Kab/Kota	1	151.165.500	Pemberdayaan Sosial Perorangan dan keluarga.	SUMUT	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang menerima pemberdayaan dan pelatihan keterampilan, Jumlah Peksos LK3, yang menerima pemberdayaan, dan Terlaksananya Bintek SLRT bagi Kab/Kota	1	151.165.500	
	Pembinaan dan Pembentukan KUBE di Lokasi Binaan PKK Terpadu	SUMUT	Jumlah Ibu-ibu PKK yang terbina di Lokasi Binaan Terpadu	40	103.447.000	Pembinaan dan Pembentukan KUBE di Lokasi Binaan PKK Terpadu	SUMUT	Jumlah Ibu-ibu PKK yang terbina di Lokasi Binaan Terpadu	40	103.447.000	
	Pembinaan dan Penumbuhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	SUMUT	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan Pembinaan dan Penumbuhan	0	0	Pembinaan dan Penumbuhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	SUMUT	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan Pembinaan dan Penumbuhan	0	0	
	Pembinaan dan Jejaringan Kerja bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	SUMUT	Jumlah TKSK yang mendapatkan Pembinaan dan Kerjasama TKSK	0	0	Pembinaan dan Jejaringan Kerja bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	SUMUT	Jumlah TKSK yang mendapatkan Pembinaan dan Kerjasama TKSK	0	0	
	Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna	SUMUT	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dan penumbuhan, Terlaksananya Bulan Bakti Karang taruna, Terlaksananya Karang Taruna EXPO, dan Terlaksananya penerbitan Najalah Getar	100	1.287.645.880	Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna	SUMUT	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan dan penumbuhan, Terlaksananya Bulan Bakti Karang taruna, Terlaksananya Karang Taruna EXPO, dan Terlaksananya penerbitan Najalah Getar	100	1.287.645.880	
	Sosialisasi dan Bintek On-Line Permohonan Undian Gratis (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang	SUMUT	Terlaksananya Pembinaan Pengusaha, Orsos dan Masyarakat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang	0	0	Sosialisasi dan Bintek On-Line Permohonan Undian Gratis (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang	SUMUT	Terlaksananya Pembinaan Pengusaha, Orsos dan Masyarakat tentang Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang	0	0	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan	1	7.809.574.200	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan	1	7.809.574.200	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Penyuluhan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan serta Penyantunan Keluarga Veteran Tidak Mampu.	SUMUT	Jumlah keluarga dan masyarakat yang mendapatkan penyantunan, penyuluhan dan Pembinaan serta destinasi wisata di TMP Bukit Barisan.	0	0	Pembinaan dan Penyuluhan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan serta Penyantunan Keluarga Veteran Tidak Mampu.	SUMUT	Jumlah keluarga dan masyarakat yang mendapatkan penyantunan, penyuluhan dan Pembinaan serta destinasi wisata di TMP Bukit Barisan.	0	0	
	Pembinaan BK3S Provsu	SUMUT	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pembinaan BK3S Provsu.	3	308.212.000	Pembinaan BK3S Provsu	SUMUT	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pembinaan BK3S Provsu.	3	308.212.000	
	Penyelenggaraan HKSN	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan HKSN Provinsi dan Tingkat Nasional	0	0	Penyelenggaraan HKSN	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan HKSN Provinsi dan Tingkat Nasional	0	0	
	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Sumut	Jumlah LKS yang menerima bintek LKS, Jumlah LKS dan Familiy Care Unit (FCU) yang menerima Pemberdayaan dan bantuan stimulan, dan Jumlah Keluarga Pioner yang terbentuk	0	0	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Sumut	Jumlah LKS yang menerima bintek LKS, Jumlah LKS dan Familiy Care Unit (FCU) yang menerima Pemberdayaan dan bantuan stimulan, dan Jumlah Keluarga Pioner yang terbentuk	0	0	
	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	0	0	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	0	0	
	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	SUMUT	**Meningkatnya kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik;**	0	-	**Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial**	SUMUT	**Meningkatnya kader yang terbentuk dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan; dan kelompok penyuluhan sosial di lokasi rawan bencana dan konflik;**	3	-	
	Penyuluhan Sosial Keliling	SUMUT	Tersampaikannya informsi PMKS dan PSKS kepada Masyarakat	0	0	Penyuluhan Sosial Keliling	SUMUT	Tersampaikannya informsi PMKS dan PSKS kepada Masyarakat	3	0	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SUMUT	**Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya.**	67	816.809.250	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	SUMUT	**Jumlah korban bencana dan keluarga miskin yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidupnya.**	67	816.809.250	
	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana	SUMUT	Jumlah Tagana mendapatkan Pemantapan, Jumlah Tagana melaksanakan Apel siaga bencana, Terlaksananya pembinaan forom Tagana, dan Jumlah Tagana yang menerima Insentif	0	0	Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana	SUMUT	Jumlah Tagana mendapatkan Pemantapan, Jumlah Tagana melaksanakan Apel siaga bencana, Terlaksananya pembinaan forom Tagana, dan Jumlah Tagana yang menerima Insentif	0	0	
	Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	SUMUT	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana Alam, Terlaksananya Pemeliharaan Reepiter, dan Terlaksananya Pemeliharaan Kenderaan Operasional Bencana Alam	1	248.124.000	Penyediaan Peralatan Penanggulangan Bencana Alam	SUMUT	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana Alam, Terlaksananya Pemeliharaan Reepiter, dan Terlaksananya Pemeliharaan Kenderaan Operasional Bencana Alam	1	248.124.000	
	Pengadaan Permakanan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam	SUMUT	Terlaksananya Pengadaan Permakanan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam, Jumlah Korban Bencana Alam menerima bantuan BBR, Jumlah Korban Bencana Alam menerima santunan korban kematian, Terlaksananya Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana, dan Terdistribusinya Permakanan (Lauk Pauk, Evakuasi Korban Bencana)	1	215.958.000	Pengadaan Permakanan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam	SUMUT	Terlaksananya Pengadaan Permakanan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam, Jumlah Korban Bencana Alam menerima bantuan BBR, Jumlah Korban Bencana Alam menerima santunan korban kematian, Terlaksananya Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana, dan Terdistribusinya Permakanan (Lauk Pauk, Evakuasi Korban Bencana)	1	215.958.000	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	SUMUT	Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Bencana, dan Teredukasinya Anak- anak Sekolah tentang penangann bencana alam	0	0	Pemetaan Daerah Rawan Bencana	SUMUT	Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Bencana, dan Teredukasinya Anak- anak Sekolah tentang penangann bencana alam	0	0	
	Pembinaan Keserasian Sosial Daerah	SUMUT	Jumlah Tomas yang mendapatkan Pembinaan Keserasian Sosial Daerah, Jumlah Sanggar Seni dan Kebudayaan Daerah yang mendapatkan Pembinaan Kearifan lokal Daerah	0	0	Pembinaan Keserasian Sosial Daerah	SUMUT	Jumlah Tomas yang mendapatkan Pembinaan Keserasian Sosial Daerah, Jumlah Sanggar Seni dan Kebudayaan Daerah yang mendapatkan Pembinaan Kearifan lokal Daerah	0	0	
	Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial	SUMUT	Jumlah Korban Bencana Sosial yang menerima Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian menerima tali asih	65	352.727.250	Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial	SUMUT	Jumlah Korban Bencana Sosial yang menerima Bimbingan Teknis Layanan Dukungan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian menerima tali asih	65	352.727.250	
	Distribusi Permakanan dan bahan Bangunan Rumah bagi Korban Bencana Sosial	SUMUT	Jumlah korban bencana sosial yang menerima dukungan pelayanan. Jumlah ahli waris korban bencana sosial yang menerima santunan kematian, Jumlah korban bencana sosial yang menerima BBR, Jumlah korban bencana sosial yang menerima Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif, dan Terdatanya masyarakat yang terkena dampak konflik rawan sosial di daerah	0	0	Distribusi Permakanan dan bahan Bangunan Rumah bagi Korban Bencana Sosial	SUMUT	Jumlah korban bencana sosial yang menerima dukungan pelayanan. Jumlah ahli waris korban bencana sosial yang menerima santunan kematian, Jumlah korban bencana sosial yang menerima BBR, Jumlah korban bencana sosial yang menerima Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif, dan Terdatanya masyarakat yang terkena dampak konflik rawan sosial di daerah	0	0	
	Pembinaan Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	SUMUT	Jumlah PMKS pekerja informal yang menerima asuransi Kecelakaan	0	0	Pembinaan Pelaksanaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	SUMUT	Jumlah PMKS pekerja informal yang menerima asuransi Kecelakaan	0	0	
	Bimbingan Pemantapan dan bantuan bagi Pendamping dan Operator PKH	SUMUT	Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang mendapatkan Bimbingan Pemantapan, dan Jumlah SDM PKH yang menerima Bimbingan Teknis berkemampuan IPTEK	0	0	Bimbingan Pemantapan dan bantuan bagi Pendamping dan Operator PKH	SUMUT	Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang mendapatkan Bimbingan Pemantapan, dan Jumlah SDM PKH yang menerima Bimbingan Teknis berkemampuan IPTEK	0	0	
	Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	SUMUT	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	0	0	Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	SUMUT	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	0	0	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	SUMUT	**Meningkatnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; Tersedianya sistem informasi dan data penyandang masalah sosial.**	0	-	**Program Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**	SUMUT	**Meningkatnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; Tersedianya sistem informasi dan data penyandang masalah sosial.**	0	-	
	Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	SUMUT	Terlaksanya Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	0	-	Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	SUMUT	Terlaksanya Rapat koordinasi daerah pembangunan bidang kesejahteraan sosial	0	-	
	Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	SUMUT	Tersosialisasinya Peraturan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	0	-	Sosialisasi Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	SUMUT	Tersosialisasinya Peraturan tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data PMKS ke Kab/ Kota	0	-	
	Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	0	-	Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan dan pembuatan lakip,laporan tahunan dan LKPJ	0	-	
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	0	-	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	0	-	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGAET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	0	-	Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan Program dan Rencana Kerja Dinas Sosial Prov. SU	0	-	
	Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	SUMUT	Terlaksanya Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	0	-	Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	SUMUT	Terlaksanya Pertemuan Penyusunan RKA dan DPA	0	-	
	Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	0	-	Penyusunan dan Sosialisasi SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	SUMUT	Terlaksanya Penyusunan SPM, NSPK, SOP dan Juknis Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	0	-	
	Pelaksanaan HKSN Tingkat Nasional	SUMUT	Berperan serta dalam Pelaksanaan HKSN Tingkat Nasional	0	-	Pelaksanaan HKSN Tingkat Nasional	SUMUT	Berperan serta dalam Pelaksanaan HKSN Tingkat Nasional	0	-	
	Penyelenggaraan Hari-Harl Besar Lainnya	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	0	-	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	SUMUT	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Lainnya	0	-	
	JUMLAH				82.914.171.753					82.714.571.753	

Medan, Juni 2020
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

dto

H. RAJALI, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670208 198611 1 001